

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri PAN dan RB RI 2. Kepala BKN 3. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri 4. Ketua KASN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 2 Februari 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Membahas terkait kebijakan kepegawaian secara nasional. 2. Membahas penyelesaian tenaga honorer 3. membicarakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 4. Membahas organisasi perangkat desa
Ketua Rapat	: H. Zainudin Amali, SE / Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 17 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Kamis, 2 Februari 2017 dibuka pada pukul 10.30 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan terkait kebijakan kepegawaian secara nasional, penyelesaian tenaga honorer, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan organisasi perangkat desa.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri PAN dan RB RI, Kepala BKN, Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri dan Ketua KASN untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB, Kemendagri, dan BKN untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mempercepat upaya penyelesaian penataan organisasi perangkat daerah, termasuk dalam hal pengisian formasi jabatan yang mencerminkan “tepat struktur tepat fungsi,”

- B. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN dan KASN untuk melakukan langkah langkah dalam rangka memastikan setiap tahapan proses pengisian jabatan dengan mendasarkan pada merit sistem dalam suatu sistem rekrutmen yang terbuka dan berbudaya pencapaian kinerja.
- C. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Kementerian PANRB dan Kemendagri (Dirjen Otonomi Daerah) dan meminta untuk segera mewujudkan dengan langkah-langkah regulatif maupun teknis untuk mengatur kebijakan rekrutmen ASN, terutama bagi daerah yang komposisi belanja pegawainya masih tinggi.
- D. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB untuk segera memberikan penjelasan secara resmi terkait kelanjutan penanganan/penyelesaian tenaga honorer (K1 dan K2).
- E. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KASN atas upaya-upaya yang telah dilakukan dan meminta KASN untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian nasional.
- F. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB untuk mempercepat terbitnya peraturan pemerintah yang terkait dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 2014 tersebut

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 2 Februari 2017
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

H. Zainudin Amali, SE
A-292